

## **ANALISIS MUTU DAN KRITERIA KELAYAKAN DOKUMEN AMDAL DI KABUPATEN BOGOR DAN KOTA BOGOR**

*(Analysis of Quality And Feasibility Criteria of Amdal Document in Bogor District and Bogor City)*

Rachma Venita<sup>a</sup>, Hefni Effendi<sup>b</sup>, Hari Wijayanto<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, 16151, Telp (021)53166141 / 087883067000 — [venyta\\_m@yahoo.com](mailto:venyta_m@yahoo.com)

<sup>b</sup> Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat (PPLH-LPPM), Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

<sup>c</sup> Direktorat Perencanaan dan Pengembangan - IPB, Gedung AHN Lt.3 Kampus IPB Darmaga Bogor 16680

**Abstract.** *The rapid development activities that occurred in Indonesia has the potential to put pressure on the environment. It therefore requires sustainable development efforts with one instrument is Environmental Impact Assessment (EIA). Along with the development and adjustment of environmental conditions, EIA policy has undergone several changes. With EIA policy changes, evaluation on EIA performance needs to be done. The performance evaluation conducted on 15 EIA documents EIA document issued by the District and City of Bogor in 2012 through 2014. The analytical method used is the analysis of the quality of the test quality criteria document and focused on quality test aspects of consistency, necessity and relevance, feasibility analysis with weighting criteria, Pearson correlation analysis of the two respondents certified appraiser to see the similarity assessment method. From the analysis it can be seen that the quality of the documents are best seen from the EIA documents to categories of tourist accommodation facilities with a score of 81 and the analysis of the eligibility criteria resulted that three documents are not worth the environment seen from discussion of the feasibility of the benchmarks in the EIA document, also PerMenLH 08 of 2013 carried out by equally from both respondents with a positive correlation results 0.681.*

Keywords: *quality document, eligibility criteria, Bogor, Environment Impact Assesment (EIA)*

(Diterima: 16-02-2015; Disetujui: 23-04-2015)

### **1. Pendahuluan**

#### *1.1. Latar Belakang*

Pesatnya kegiatan pembangunan yang terjadi di Indonesia berpotensi memberikan tekanan terhadap kelestarian lingkungan. Program pembangunan yang hanya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan akan mengakibatkan tidak terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam, yang pada akhirnya dapat merusak lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya alam yang konsumtif tanpa mempergunakan prinsip konservasi menyebabkan terkurusnya sumberdaya alam dan terganggunya jenis baik flora maupun fauna (Fandeli 2001).

Dalam rangka meminimalkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan diperlukan upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Salah satu instrumen / perangkat

pengelolaan dalam undang-undang tersebut adalah analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

AMDAL merupakan perangkat pengelolaan yang bersifat preventif yaitu tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan yang harus dipertanggungjawabkan. AMDAL merupakan studi/kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha atau kegiatan serta dokumen pengelolaan dan pemantauan yang cukup efektif (Wahyono et al. 2012). Kebijakan AMDAL dimulai sejak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 29 tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan dan telah mengalami tiga kali perubahan sampai dengan PP Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Faktor-faktor pendorong perubahan peraturan AMDAL di negara berkembang adalah tidak tercapainya hasil yang maksimal dan kinerja AMDAL yang lemah dan penyesuaian kondisi lingkungan dan pengalaman untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja AMDAL (Arend et al. 2013).

Di Afrika Selatan perubahan undang-undang berdampak terhadap penurunan kualitas dokumen AMDAL (Sandham et al. 2013), kondisi tersebut juga berpotensi terjadi di Indonesia. Dinamika kebijakan AMDAL berimplikasi terhadap kualitas dokumen. Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap

kualitas dokumen AMDAL adalah pemberlakuan otonomi daerah melalui PP nomor 38 tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (KLH 2008). Hasil evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap 106 dokumen dari propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa kualitas dokumen masih banyak yang bernilai buruk, yaitu 97 dokumen (91.5 %) dan sedikit yang bernilai bagus, yaitu sebanyak 9 dokumen (8.5 %).

Bogor sebagai salah satu barometer pembangunan di Jawa Barat mengalami perkembangan industri yang pesat dan beragam jenisnya. Di Kota Bogor terdapat unit usaha sebanyak 1.183 pada tahun 2011 dan 1.193 pada tahun 2012, dimana terdapat jenis industri seperti industri tekstil, industri logam dan industri alat angkut (Bapeda 2012) dan di Kabupaten Bogor terdapat industri kecil dan menengah sebanyak 14.505 pada tahun 2011 dan industri besar sebanyak 473 (Pusdalisbang 2012).

Sayangnya dari sekian banyak industri besar di Bogor tidak selalu diiringi dengan perencanaan pengelolaan lingkungan yang baik. Terdapat kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (khususnya terkait dengan instrumen pengelolaan lingkungan hidup AMDAL), dimana terdapat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang sudah dilakukan kegiatan konstruksi tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan evaluasi dan pengembangan terhadap proses yang berlangsung agar efektivitas AMDAL sebagai alat pengelolaan lingkungan terus meningkat. Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah analisis mutu dokumen AMDAL dan pemenuhan kriteria kelayakan. Dokumen AMDAL yang bermutu memang tidak menjamin mutlak bahwa pelaksanaan AMDAL di lapangan akan terlaksana secara efektif, namun dokumen yang berkualitas merupakan dasar utama pengambilan keputusan serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan selanjutnya. Evaluasi mutu diperlukan, karena kualitas hasil kajian AMDAL sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan kelayakan dari segi lingkungan untuk dapat dilakukan secara cepat dan tepat bila semua informasi tersedia secara lengkap, memiliki daya pendukung yang berkualitas dan dasar-dasar argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan (Soemarwoto 2001).

Dokumen AMDAL yang berkualitas dan bermutu baik disusun oleh penyusun yang kompeten dan bersertifikasi dengan mengacu pada panduan penyusunan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PerMenLH) nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup dan penilaian dilakukan Komisi Penilai berlisensi dengan panduan penilaian dalam PerMenLH nomor 08 tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin ling-

kungan. Penilai berasal dari Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan Daerah yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan bias kualitas penilaian terkait mutu dokumen.

Penelitian ini merupakan kajian ilmiah yang berguna untuk melihat mutu dokumen AMDAL dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dokumen yang telah dinilai sebagai bahan rekomendasi untuk langkah perbaikan dalam prosedur menguji kualitas dokumen AMDAL di masa mendatang.

Penelitian mengacu pada penelitian sebelumnya (Catherina 2004) dengan batasan penilaian pada uji kualitas (konsistensi, keharusan dan relevansi) serta penambahahan pada analisis kelayakan lingkungan dalam metode penelitiannya.

## 1.2. Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mekanisme evaluasi kinerja yang dilakukan oleh penilai dokumen AMDAL terhadap mutu dokumen AMDAL dan kriteria kelayakan dokumen yang dikeluarkan oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten dan Kota Bogor pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis mutu dokumen AMDAL 2012-2014 pada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten dan Kota Bogor dan klasifikasi dokumen berdasarkan jenis industrinya.
2. Menganalisis pemenuhan kriteria kelayakan lingkungan pada dokumen AMDAL Kabupaten dan Kota Bogor.
3. Menganalisis implementasi penggunaan pedoman penilaian PerMenLH nomor 08 Tahun 2013 dari kedua responden penilai AMDAL yang berasal dari Komisi penilai AMDAL pusat dan daerah yang telah memiliki sertifikat penilai AMDAL.

## 2. Metode

### 2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dan penyebaran kuisioner dilakukan pada Forum Amdal Indonesia di Bogor. Penelitian ini telah selesai dilakukan pada bulan Juni-Desember 2014

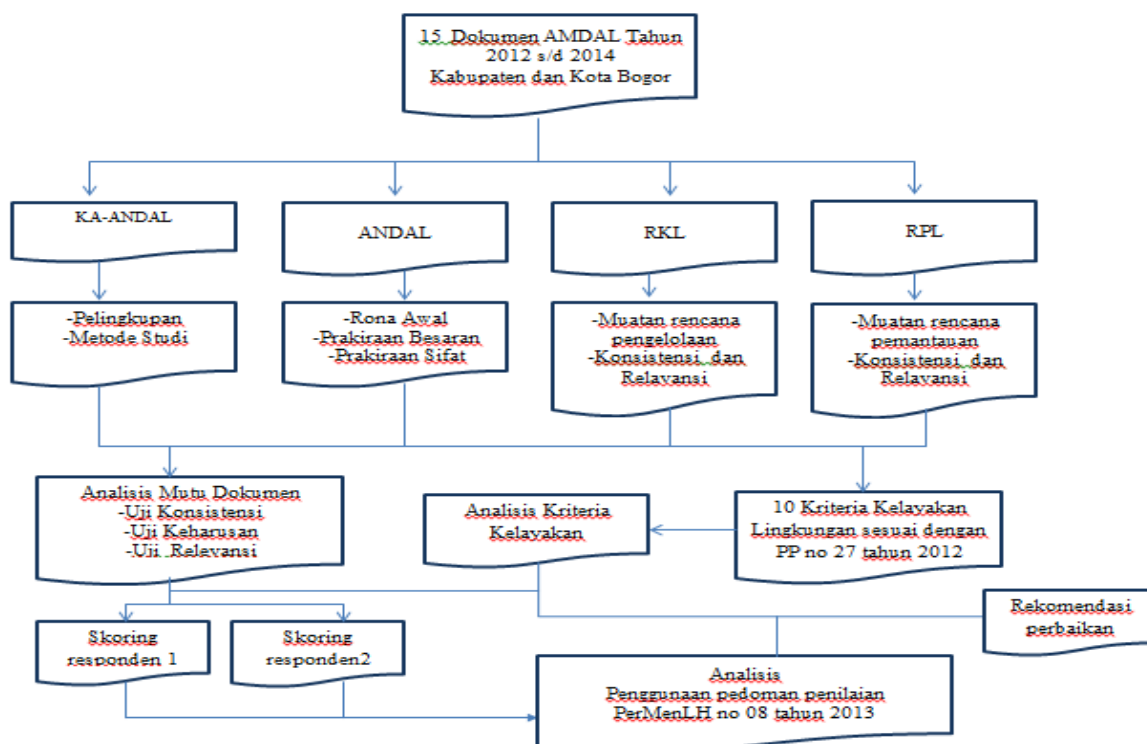
### 2.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah dokumen AMDAL yang telah disetujui di Kabupaten dan Kota Bogor tahun 2012-2014, Peraturan AMDAL, formulir uji konsistensi, keharusan, relevansi serta formulir kelayakan dokumen.

### 2.3 Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan analisis, yaitu analisis mutu dokumen AMDAL,

analisis kriteria kelayakan, analisis dua responden menggunakan pedoman penilaian PerMenLH nomor 08 tahun 2013 (Gambar 1).



Gambar 1. Bagan alir metode penelitian

#### a. Analisis Mutu Dokumen AMDAL

Analisis mutu dokumen dilakukan pada 15 dokumen AMDAL yang memiliki kelengkapan (meliputi dokumen KA, ANDAL, RKL, RPL) dan persetujuan dokumen yang dikeluarkan dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan jenis kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor. Lima belas sampel dokumen terpilih karena jumlah tersebut mewakili populasi dokumen pada rentang waktu 2012 sampai dengan 2014 dengan jumlah total 26 dokumen (15 di Kabupaten Bogor dan 11 Kota Bogor). Informasi sampel dokumen ditampilkan pada Tabel 1.

Dalam penilaian dokumen AMDAL, responden mengacu pada PerMenLH No 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen dan prosedur pada panduan penilaian dokumen AMDAL Teknik Penilaian Dokumen AMDAL (KLH 2002) yang sampai saat ini masih berlaku.

Prosedur yang mengacu pada pedoman Penilaian AMDAL PermenLH 08 Tahun 2013 pada penelitian ini dibatasi pada uji kualitas yaitu uji mutu aspek konsistensi, keharusan dan relevansi, uji-uji tersebut juga terdapat pada pedoman penilaian AMDAL sebelumnya di PermenLH 24 tahun 2009.

Aspek konsistensi adalah menilai konsistensi penyusunan dokumen AMDAL maupun pelaksanaan kajiannya. Secara rinci, uji konsistensi meliputi:

- a. konsistensi antara dampak penting hipotetik dari hasil pelingkupan (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode studi yang akan digunakan;
- b. konsistensi antara dampak penting hipotetik (termasuk parameter yang dikaji) dengan metode prakiraan dampak, rona lingkungan awal, prakiraan besaran dampak, sifat penting dampak, evaluasi secara holistik serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- c. konsistensi dampak lingkungan (termasuk parameter-nya) yang akan dikelola yang tertera pada KA dan Andal dengan yang tertera dalam RKL-RPL.

Aspek keharusan dilakukan untuk menilai bahwa suatu dokumen Amdal telah memenuhi aspek-aspek yang harus ada dalam suatu dokumen Amdal, Secara rinci dokumen AMDAL wajib berisi:

- a. proses pelingkupan, dengan hasil berupa dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu kajian yang dilengkapi dengan metode studi;
- b. dampak penting, prakiraan besaran dampak dan prakiraan sifat penting dampak;
- c. evaluasi holistik termasuk penentuan kelayakan lingkungan hidup; dan dampak yang dikelola dan dipantau dan rencana pengelolaan dan pemantauan dampak dimaksud.

Sedangkan untuk aspek relevansi dilakukan untuk memastikan:

- a. kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan dampak lingkungan yang timbul;

Tabel 1. Informasi sampel dokumen

No	Dokumen	Komisi Penilai AMDAL (KPA)	Tahun penerbitan SK Kesepakatan	Tahun penerbitan SK Kelayakan
1	Sarana Akomodasi Wisata	Kabupaten Bogor	2012	2012
2	Pembangunan Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa	Kabupaten Bogor	2012	2012
3	Pembangunan Gudang, Distribusi Sembako dan Alat Rumah Tangga	Kabupaten Bogor	2012	2012
4	Pemanfaatan sumber Air Baku	Kabupaten Bogor	2012	2012
5	Pembangunan sport centre	Kabupaten Bogor	2013	2013
6	Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan	Kabupaten Bogor	2013	2013
7	Pembangunan pusat perdagangan dan pergudangan	Kabupaten Bogor	2012	2013
8	Industri Ban Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bogor	2012	2013
9	Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium	Kota Bogor	2012	2013
10	Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Hotel	Kota Bogor	2014	2014
11	Pengembangan Gedung Pasar Kebon	Kota Bogor	2014	2014
12	Pembangunan Apartemen	Kota Bogor	2014	2014
13	Pembangunan Inner Ring Road	Kota Bogor	2011	2012
14	Pembangunan Perhotelan dan rekreasi	Kota Bogor	2013	2014
15	Rencana Kegiatan Pembangunan Toserba	Kota Bogor	2013	2014

- b. kesesuaian antara arahan upaya pemantauan lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan dampak lingkungan yang timbul;
- c. kesesuaian antara bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk pemantauan lingkungan dengan dampak lingkungan yang timbul;
- d. kesesuaian antara lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak;
- e. kesesuaian antara periode pengelolaan dengan waktu terjadinya dampak; dan
- f. ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan, dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau.

Setelah dilakukan uji konsistensi, keharusan dan relevansi dilakukan pembobotan pada formulir skoring nilai dokumen yang dimaksudkan untuk melihat peringkat mutu dari ke-15 dokumen. Pemberian nilai pembobotan berdasarkan perhitungan bahwa setiap dokumen yang memenuhi ketiga uji secara lengkap diberi nilai 81-100 dokumen berkualitas baik, nilai 51 – 80 dokumen berkualitas sedang dan nilai 0 – 51 dokumen berkualitas buruk.

#### b. Analisis Kriteria Kelayakan Lingkungan

Aspek penting dari proses penilaian dokumen AMDAL adalah menilai kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan informasi yang valid dan akurat yang tercantum dalam dokumen AMDAL yang diperoleh berdasarkan hasil kajian yang dilakukan secara baik dan benar. Hanya dokumen AMDAL yang telah lolos uji mutu dokumen yang sebenarnya dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan untuk menetapkan kelayakan lingkungan hidup (Primiantoro 2014).

Kriteria kelayakan lingkungan sudah dibangun sejak PP 27 tahun 2009 dan dituangkan dalam Panduan penilaian PermenLH 24 tahun 2009, pada permen tersebut juga terdapat proses pemeriksaan terhadap rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan yang mempunyai beberapa syarat yang sama dengan kriteria kelayakan lingkungan yang ada pada PermenLH 08 Tahun 2013.

Kriteria kelayakan lingkungan terdiri dari sepuluh tolok ukur yaitu kesesuaian rencana tata ruang, kebijakan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kepentingan pertahanan keamanan, prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak, kepentingan pertahanan keamanan, prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak, kemampuan pemrakarsa bertanggungjawab, rencana usaha yang tidak mengganggu nilai-nilai sosial dan nilai entitas ekologis, tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar dan tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Analisis kriteria kelayakan dilakukan dengan pemberian skor terhadap kesepuluh tolok ukur diatas. Jumlah total tolok ukur adalah sebanyak 21 poin. Masing-masing tolok ukur diberi penilaian (skor) 1 atau 0.5 atau 0. Pemberian nilai terhadap tolok ukur tersebut didasarkan pada ada tidaknya pembahasan terkait dengan tolok ukur tersebut dalam dokumen AMDAL. Setiap tolok ukur memiliki bobot penilaian yang sama, artinya tingkat kepentingan dianggap setara. Tidak ada tolok ukur yang dianggap lebih penting daripada tolok ukur lainnya. Jika ada pembahasan tentang tolok ukur dimaksud, maka diberi skor 1, Jika tidak ada pembahasan diberi skor 0. Jika ada pembahasan, namun be-

lum berkesesuaian dengan yang dimaksud pada tolok ukur tersebut maka diberi skor 0.5 (PPLH IPB 2002).

*c. Analisis Penggunaan Pedoman Penilaian PerMenLH Nomor 08 Tahun 2013*

Analisis ini dilakukan dengan korelasi untuk melihat apakah tatalaksana penilaian menurut PerMenLH 08 Tahun 2013 dilakukan dengan cara yang sama oleh dua responden (Instansi Lingkungan Pusat dan Daerah) yang memiliki sertifikat penilai AMDAL. Data hasil akhir penilaian 15 dokumen kemudian diolah dengan Minitab dengan metode korelasi *Pearson*. Korelasi *Pearson* digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang memiliki data interval/rasio (Walpole 1995). Selain melihat persamaan, dilakukan juga analisis untuk melihat perbedaan hasil penilaian kedua responden untuk melihat aspek-aspek apa saja yang sangat berbeda nilainya pada isi dokumen.

**3. Hasil dan Pembahasan**

*3.1 Analisis Mutu Dokumen AMDAL*

Penilaian mutu dokumen AMDAL dilakukan dengan teknik analisis data dengan menggunakan formulir uji mutu untuk melihat aspek konsistensi, keharusan dan relevansi. Ketiga uji ini dilakukan karena sifatnya mendasar, yaitu dokumen wajib secara konsisten mengkaji dampak penting hipotetik yang telah disepakati dalam KA ANDAL, dan pada saat mengkaji dampak dokumen ANDAL mampu memberikan gambaran tentang besaran (magnitude) terjadinya perubahan komponen lingkungan yang akan terjadi akibat adanya suatu rencana kegiatan /usaha. Setelah dilakukan pengisian formulir ketiga uji (konsistensi, keharusan dan relevansi) kemudian dilakukan pemberian bobot seperti yang dilakukan oleh (Chang et al. 2013).

*a. Uji Konsistensi*

Uji konsistensi secara umum adalah menilai konsistensi penyusunan dokumen AMDAL. Konsistensi meliputi metode pengolahan data (PD), analisa data (AD), prakiraan besaran dampak penting (PBD), prakiraan sifat dampak penting (PSPD), rona awal, hasil besaran dampak (B), hasil sifat penting dampak (S), evaluasi secara holistik (EV), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan jenis izin PPLH (Tabel 2).

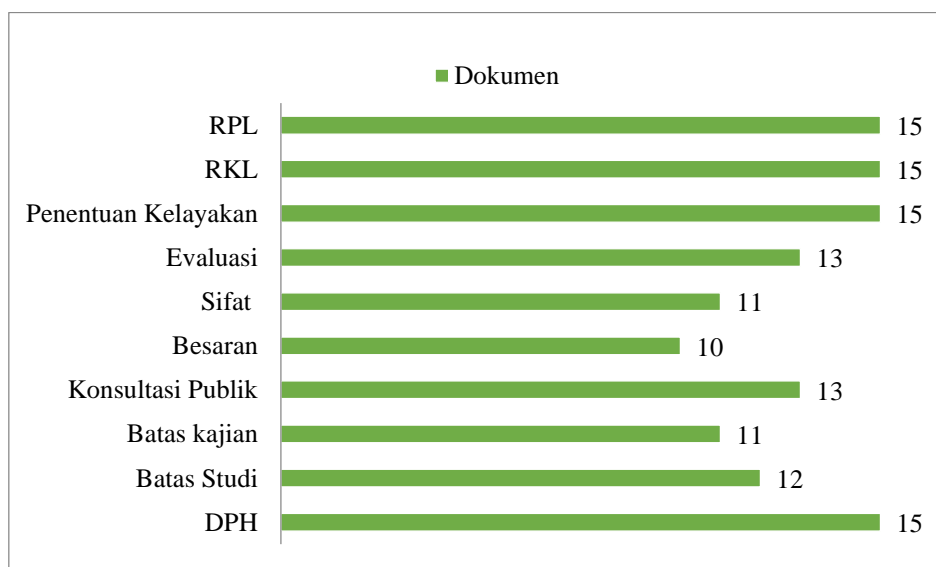
Dari hasil uji konsistensi 15 dokumen terlihat bahwa keseluruhan dokumen belum memenuhi uji mutu aspek konsistensi, namun terdapat beberapa dokumen yang sudah memenuhi uji konsistensi jika dilihat dari pemenuhan kajian Dampak Penting Hipotetik perdokumennya (Tabel 3).

Isian bab yang paling tidak konsisten dengan kajian dampak penting adalah bab metode pengolahan data, analisa data, prakiraan besaran penting, rona awal. Untuk isian bab jenis izin PPLH terdapat 10 dokumen yang belum mengisi bab ini, hal ini terjadi karena bab ini merupakan format baru dalam pedoman penyusunan dokumen AMDAL yang berlaku.

*b. Uji Kecharusan*

Uji kecharusan secara umum dimaksudkan untuk menilai bahwa suatu dokumen AMDAL telah memenuhi aspek-aspek yang harus ada dalam suatu dokumen AMDAL. Uji kecharusan untuk kelima belas dokumen dapat dilihat pada Gambar 2.

Dari analisis uji mutu kecharusan terhadap 15 dokumen AMDAL yang disetujui oleh komisi penilai AMDAL Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, terlihat semua dokumen telah melakukan proses penentuan dampak penting, penentuan kelayakan, RKL dan RPL. Penentuan dampak sudah mengacu pada pedoman penyusunan dokumen walaupun kebanyakan dokumen tidak spesifik menuliskan parameter yang terkena dampak pada penulisan nama dampak hipotetiknya.



Gambar 2. Hasil uji kecharusan  
Tabel 2. Hasil uji konsistensi

Keterangan:

No	Dokumen	Metodologi					R O N A	Prakiraan		EV	R K L	R P L	Jenis Izin
		P D	A D	P B P D	P S P D	E S H		B	S				
1	Sarana Akomodasi Wisata	v	v	v	v	v	x	v	v	v	x	x	x
2	Pembangunan Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa	x	x	x	x	x	x	v	v	v	v	v	x
3	Pembangunan Gudang, Distribusi Sembako dan Alat Rumah Tangga	x	x	x	v	v	x	x	x	v	x	x	v
4	Pemanfaatan sumber Air Baku	v	v	v	v	v	x	x	x	v	v	v	v
5	Pembangunan sport centre	x	x	x	v	v	v	x	x	v	x	x	x
6	Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan	x	x	x	v	x	x	x	x	v	x	x	x
7	Pembangunan pusat perdagangan dan pergudangan	x	x	x	x	v	x	v	v	x	v	v	v
8	Industri Ban Kendaraan Bermotor	x	x	x	x	v	x	x	v	v	x	x	x
9	Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium	x	x	x	v	v	x	x	x	v	v	v	x
10	Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Hotel	x	x	v	v	x	x	x	v	v	x	x	x
11	Pengembangan Gedung Pasar Kebon	v	v	v	v	v	v	x	x	v	v	v	x
12	Pembangunan Apartemen	v	v	v	v	v	v	x	x	v	v	v	v
13	Pembangunan Inner Ring Road	x	x	x	v	x	x	x	x	v	x	x	x
14	Pembangunan Perhotelan dan rekreasi	x	x	x	v	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Rencana Kegiatan Pembangunan Toserba	v	v	v	v	v	x	v	v	v	x	x	v
Konsisten (v)		5	5	5	12	10	3	4	6	13	6	6	5
Tidak konsisten (x)		10	10	10	3	5	12	11	9	2	9	9	10

Pengolahan data (PD), analisa data (AD), prakiraan besaran dampak penting (PBD), prakiraan sifat dampak penting (PSPD), rona awal, hasil besaran dampak (B), hasil sifat penting dampak (S), evaluasi secara holistik (EV), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Tabel 3. Konsistensi dampak penting hipotetik per dokumen

No	Dokumen	Jumlah DPH	Konsistensi DPH	Inkonsistensi DPH
1	Sarana Akomodasi Wisata	24	54.17 %	45.83 %
2	Pembangunan Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa	19	78.95 %	21.05 %
3	Pembangunan Gudang, Distribusi Sembako dan Alat Rumah Tangga	19	78.95 %	21.05 %
4	Pemanfaatan sumber Air Baku	13	61.54 %	30.77 %
5	Pembangunan sport centre	15	46.67 %	40.00 %
6	Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan	16	6.25 %	6.25 %
7	Pembangunan pusat perdagangan dan pergudangan	11	63.64 %	36.36 %
8	Industri Ban Kendaraan Bermotor	23	43.48 %	56.52 %
9	Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium	10	70.00 %	30.00 %
10	Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Hotel	15	46.67 %	53.33 %
11	Pengembangan Gedung Pasar Kebon	15	86.67 %	13.33 %
12	Pembangunan Apartemen	15	93.33 %	6.67 %
13	Pembangunan Inner Ring Road	21	9.52 %	90.48 %
14	Pembangunan Perhotelan dan rekreasi	22	63.64 %	36.36 %
15	Rencana Kegiatan Pembangunan Toserba	16	87.50 %	12.50 %

Pada konsultasi publik, dari 15 dokumen terdapat 2 dokumen yang tidak menampilkan pengumuman di media cetak dan tidak menjadikan hasil konsultasi publik menjadi bagian dari isu pokok pelingkupan.

Terdapat 3 dokumen yang tidak mengacu pada kaidah-kaidah kartografi dalam menampilkan batas studinya, peta bukan merupakan peta dasar, tidak berwarna, berskala dan mempunyai legenda, sehingga informasi yang ada pada peta tidak jelas batasannya. Untuk batas waktu kajian terdapat 4 dokumen yang tidak mengidentifikasi berapa lama waktu yang dikaji untuk tiap dampak penting hipotetiknya.

Pada bab prakiraan besaran dampak penting, 5 dokumen tidak memberikan kuantifikasi tentang seberapa besar perubahan dampak yang terjadi sebelum dan sesudah proyek dan 4 dokumen sama

sekali tidak melakukan prakiraan sifat penting dampak mengacu pada pedoman kriteria ukuran dampak penting (jumlah manusia, luas sebaran, lamanya dampak berlangsung, intensitas, komponen lingkungan terkena dampak, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak).

*c. Uji Relevansi*

Uji mutu aspek relevansi dilakukan untuk melihat apakah parameter lingkungan hidup yang dikelola dan dipantau telah disajikan dalam dokumen RKL - RPL, serta relevan dengan yang ditelaah dalam dokumen ANDAL. Hasil uji relevansi menunjukkan 7 dokumen relevan dan 8 dokumen kurang relevan dengan rincian kategori kegiatan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil uji relevansi

No	Kegiatan	Skor	Kegiatan	Skor
1	Sarana akomodasi wisata	20	Pembangunan Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa Terpadu	7.5
2	Pembangunan Gedung kuliah dan Laboratorium	12.5	Pembangunan Gudang, Distribusi Sembako dan Alat Rumah Tangga	7.5
3	Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Hotel	15	Pemanfaatan Sumber Air Baku	7.5
4	Pembangunan Gedung Pasar Kebon	12.5	Pembangunan Sport Centre	10
5	Pembangunan Apartemen	15	Rencana Kegiatan Gedung pusat Pendidikan dan Pelatihan	7.5
6	Pembangunan Perhotelan dan Rekreasi	15	Pembangunan Pusat Perdagangan dan Gudang	7.5
7	Rencana Kegiatan Pembangunan toserba	15	Industri Ban Kendaraan Bermotor	10
8			Pembangunan Inner ring road	11
Kesimpulan		Relevan skor $\geq 12.5$		Kurang Relevan skor $\leq 12.5$

Berdasarkan metode yang dilakukan Asdep Kajian Dampak Lingkungan, penentuan relevan dan kurang relevan dokumen RKL-RPL dilihat dari pemberian bobot pada formulir skoring nilai dokumen AMDAL. Bobot maksimal diberi nilai 25, dianggap relevan jika salah satu responden memberi nilai  $\geq 12.5$  dan kurang relevan jika salah satu responden memberi nilai  $\leq 12.5$ .

*d. Pembobotan*

Setelah menganalisis uji mutu aspek konsistensi, keharusan dan relevansi, serta telah mengetahui posisi ke-15 dokumen dalam kaitannya dengan uji-uji tersebut, maka untuk kajian selanjutnya dilakukan pemberian bobot pada formulir skoring nilai dokumen oleh kedua responden. Pembobotan dilakukan untuk melihat peringkat kategori kegiatan terbaik berdasarkan aspek-aspek penting dalam penyusunan dokumen. Setelah dilakukan pemobotan kemudian dikelompokkan kualitas dokumen berdasarkan kualitasnya apakah dokumen berkualitas baik, sedang atau buruk. Rincian hasil skor penilaian dokumen oleh responden 1 dan 2 ditampilkan pada Tabel 5.

Dari hasil penilaian ke-15 dokumen oleh kedua responden, diperoleh 13 dokumen berkualitas sedang (kisaran nilai 51-80), 1 dokumen berkualitas baik

(kisaran nilai 81-100) dan 1 dokumen berkualitas buruk (nilai 0-51). Dokumen dengan nilai terbaik dilakukan oleh kegiatan sarana akomodasi wisata.

*3.2. Analisis Kriteria Kelayakan Lingkungan*

Berdasarkan pembahasan tolok ukur kelayakan yang dikaji dalam 15 dokumen AMDAL maka suatu rencana usaha/kegiatan yang dinilai dokumen AMDALnya dinyatakan layak jika memperoleh skor agregat dengan kisaran 15-21 poin, dengan keharusan semua tolok ukur wajib dibahas dalam dokumen.

Berdasarkan Gambar 2, terdapat 3 dokumen yang berada dibawah standar pengesahkan kelayakan lingkungan seiring dengan 3 dokumen dengan skor penilaian terendah pada Tabel 3, hal ini disebabkan pada pembahasan didalam dokumen terdapat beberapa tolok ukur kriteria kelayakan yang tidak dibahas dalam dokumen AMDAL.

*3.3 Analisis Penggunaan Pedoman Penilaian PerMenLH Nomor 08 Tahun 2013*

Hasil penilaian 15 dokumen AMDAL dengan mengacu uji kualitas pada pedoman penilaian

PerMenLH 08 Tahun 2013 dilakukan oleh dua responden yang berasal dari Komisi Penilai AMDAL pusat dan daerah yang telah memiliki sertifikat penilai seperti yang dilihat pada Gambar 4.

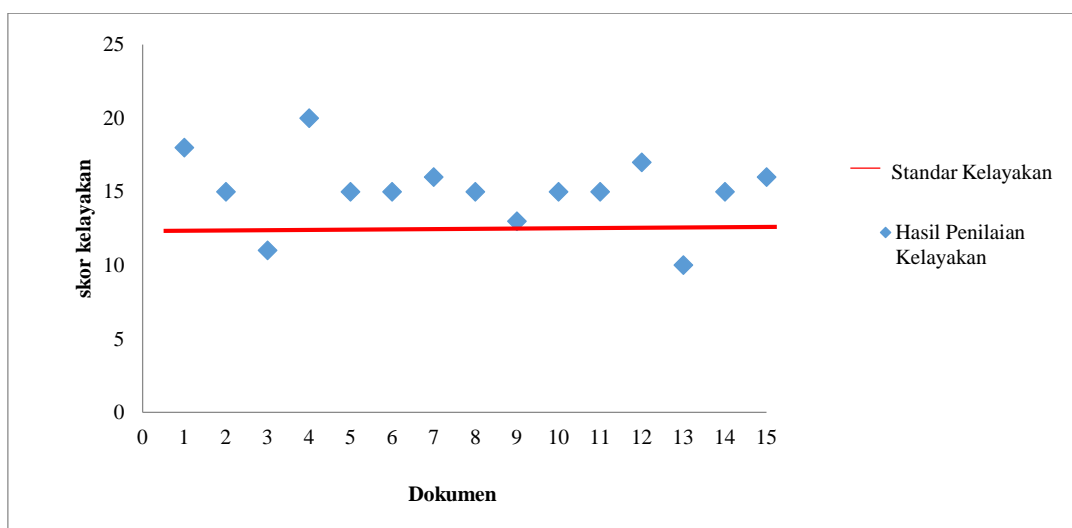
Dari grafik diperoleh korelasi dengan metode *Pearson*, dengan nilai korelasi yang positif, antara responden 1 dan responden 2 sebesar 0.681 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua responden melakukan

tatalaksana penilaian menurut PerMenLH 08 Tahun 2013 dengan cara yang sama.

Perbedaan hasil penilaian (dengan jarak >10) terdapat pada dokumen 4 dengan perbedaan nilai pada aspek prakiraan dampak dan dokumen 12 dan 15 dengan aspek relevansi dampak dengan rencana pemantauan.

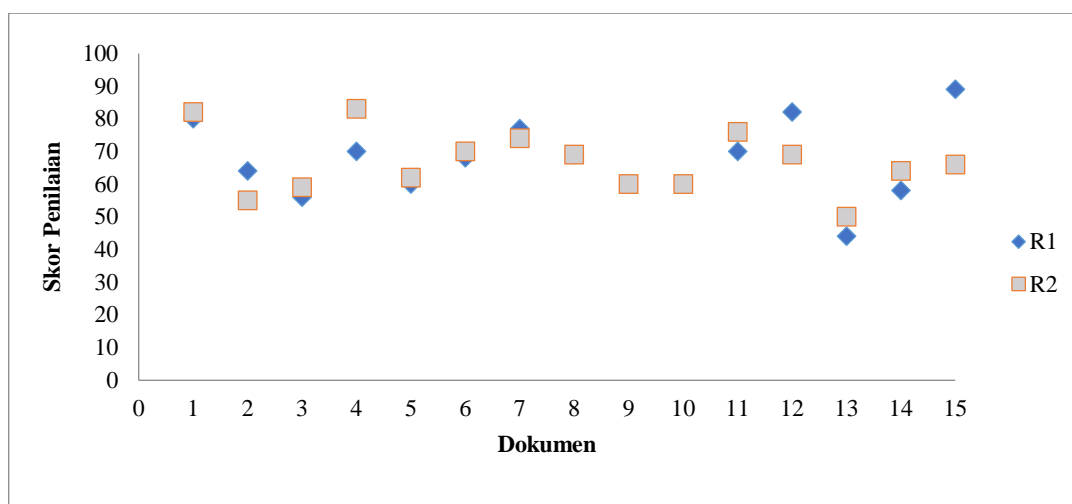
Tabel 5. Hasil skor penilaian dokumen responden 1 dan responden 2

No	Dokumen	Standar	Hasil Skor		Rata-rata Responden 1 & 2	Kualitas Dokumen
			R1	R2		
1	Sarana Akomodasi Wisata	100	80	82	81	Baik
2	Pembangunan Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa	100	64	55	60	Sedang
3	Pembangunan Gudang, Distribusi Sembako dan Alat Rumah Tangga	100	56	59	58	Sedang
4	Pemanfaatan sumber Air Baku	100	70	83	76	Sedang
5	Pembangunan sport centre	100	60	62	61	Sedang
6	Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan	100	68	70	69	Sedang
7	Pembangunan pusat perdagangan dan pergudangan	100	77	74	76	Sedang
8	Industri Ban Kendaraan Bermotor	100	69	69	69	Sedang
9	Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium	100	60	60	60	Sedang
10	Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Hotel	100	60	60	60	Sedang
11	Pengembangan Gedung Pasar Kebon	100	70	76	73	Sedang
12	Pembangunan Apartemen	100	82	69	75	Sedang
13	Pembangunan Inner Ring Road	100	44	50	47	Buruk
14	Pembangunan Perhotelan dan rekreasi	100	58	64	61	Sedang
15	Rencana Kegiatan Pembangunan Toserba	100	89	66	77	Sedang



Gambar 3. Hasil uji kriteria kelayakan





Gambar 4. Hasil perbandingan penilaian responden 1(R1) dan responden (2)

#### 4. Kesimpulan

1. Dari hasil analisis mutu 15 dokumen yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor dan Kota Bogor pada tahun 2012-2014 diperoleh bahwa:
  - a. Seluruh dokumen masih belum memenuhi uji mutu aspek konsistensi, namun terdapat beberapa dokumen sudah memenuhi uji konsistensi jika dilihat dari pemenuhan kajian Dampak Penting Hipotetik perdokumennya. Bab yang paling tidak konsisten dengan dampak penting yang dikaji adalah bab metode pengolahan data, analisa data, prakiraan besaran penting, rona awal dan Jenis izin PPLH.
  - b. Untuk uji mutu aspek keharusan, masih ada yang belum memenuhi kriteria keharusan yaitu penentuan batas studi (3 dokumen), batas waktu kajian (4 dokumen), prakiraan besaran (5 dokumen) dan sifat penting dampak (4 dokumen), sedangkan untuk kriteria penentuan dampak penting, penentuan kelayakan, RKL dan RPL telah dilakukan seluruhnya(15 dokumen).
  - c. Uji mutu aspek relevansi, diperoleh 7 dokumen telah relevan dan 8 dokumen kurang relevan dalam menyajikan parameter yang dikelola dan dipantau dalam dokumen RKL-RPL.
  - d. Setelah dilakukan ketiga uji diatas, dilakukan pemberian skor, dan Dari hasil penilaian ke-15 dokumen kedua responden, diperoleh 13 dokumen berkualitas sedang, 1 dokumen berkualitas buruk dan 1 dokumen berkualitas baik. Dokumen dengan nilai terbaik dilakukan oleh kategori kegiatan sarana akomodasi wisata.
2. Analisis tolok ukur kelayakan lingkungan menunjukkan bahwa 3 dokumen berada di bawah standar pengesahan kelayakan lingkungan, hal ini disebabkan pada pembahasan didalam dokumen

terdapat beberapa tolok ukur kriteria kelayakan yang tidak dibahas.

3. Implementasi penggunaan pedoman penilai PerMenLH 08 Tahun 2013 menunjukkan korelasi yang positif antara penilai 1 dan penilai 2 sebesar 0.681, sehingga kedua responden telah melakukan tatalaksana penilaian dengan cara yang sama menurut PerMenLH 08 Tahun 2013.

#### 5. Saran

1. Dalam melakukan penilaian dokumen di masa mendatang, agar tim komisi penilai AMDAL dapat melakukan penilaian mengacu pada aspek-aspek yang mendasar (konsistensi, keharusan dan relevansi) sesuai prosedur PerMenLH 08 Tahun 2013 dan pemberian sanksi bagi yang tidak melakukannya.
2. Perlunya pembuatan panduan yang jelas dan terperinci terkait kriteria kelayakan lingkungan berikut sosialisasinya.

#### 6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kementerian Lingkungan dan Kehutanan yang telah membiayai penelitian ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada BLH Kabupaten Bogor dan BLH Kota Bogor yang membantu dalam kelancaran penelitian ini.

#### Daftar Pustaka

- [1] Arend, J., P. J. Peter, A. C. Hens, 2013. An analysis framework for characterizing and explaining development of EIA legislation in developing countries. *Environmental Impact Assessment Review* 38.
- [2] [BAPEDA] Badan Perencanaan Daerah Bogor, 2012. Bogor dalam Angka. BAPEDA, Bogor.
- [3] Chang, T., E. Nielsen, W. Auberle, I. F. Solop, 2013. A quantitative method to analyze the quality of EIA information

- in wind energy development and avian/bat assessments. *Environmental Impact Assessment Review* 38.
- [4] Catherina, Y., 2004. *Evaluasi Dokumen AMDAL*. Tesis. UI, Jakarta.
- [5] Fandeli, C., 2001. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemanannya dalam Pembangunan*. Liberty, Yogyakarta.
- [6] Sandham, L. A., A. J. van Heerden, C. E. Jones, F. P. Retief, A. N. Morrison-Saunders, 2013. Does enhanced regulation improve EIA report Quality?. *EIA Review* 37.
- [7] Primiantoro, E., *Proses Penentuan Kelayakan Lingkungan Hidup*. Pedoman Asdep Urusan Kajian Dampak Lingkungan, Jakarta.
- [8] [PUSDALISBANG] Pusat data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat, 2014. *Data Industri Besar, Menengah dan Besar Jawa Barat*.
- [9] [PPLH] Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB, 2012. *Academic Paper Kelayakan Lingkungan*.
- [10] [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup, 2008. *Laporan Tahunan Asisten Deputi Urusan Kajian Dampak Lingkungan*, KLH, Jakarta.
- [11] [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup. 2013. *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan*. KLH, Jakarta.
- [12] [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup, 2012. *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup*. KLH, Jakarta.
- [13] [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup, 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- [14] [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup, 2002. *Teknik Penilaian Dokumen AMDAL*. KLH, Jakarta.
- [15] Soemarwoto, 2001. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- [16] Walpole, R. E., 1995. *Pengantar Statistika*. Edisi ke-3. Gramedia, Jakarta.
- [17] Wahyono, Suntoro, Sutarno, 2012. Efektifitas pelaksanaan dokumen lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ekosains* 4.